



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN NASIONAL PERTOLONGAN DAN
PENCARIAN/BASARNAS)**

Tahun Sidang	: 2024 – 2025
Masa Sidang	: I
Rapat	: Ke – 21
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Hari/Tanggal	: Rabu, 18 September 2024
Sifat	: Terbuka
Pukul	: 10.15 WIB s.d 12.45 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V) Gedung Nusantara DPR RI.
Acara	: Penyesuaian alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan rincian kegiatan masing-masing unit Eselon I K/L Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA. 2025
Ketua Rapat	: Lasarus, S.Sos.,M.Si
Sekretaris	: Nunik Prihatin Budiastuti, S.H
Hadir Anggota	: ... dari 55 orang Anggota Komisi V DPR RI.
Hadir Mitra	: Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta jajaran.

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 10.15.WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa agenda Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada hari ini adalah membahas Penyesuaian alokasi anggaran menurut fungsi, program, dan rincian kegiatan masing-masing unit Eselon I K/L Mitra Kerja Komisi V DPR RI dalam RAPBN TA. 2025.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri PUPR untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

- Komisi V DPR RI dapat menyetujui penyesuaian pagu anggaran RAPBN TA 2025 Kementerian PUPR sesuai dengan hasil pembahasan Belanja Kementerian/Lembaga dalam surat Badan Anggaran DPR RI Nomor B/11277/AG.05.02/09/2024 tanggal 10 September 2024 sebagai berikut:

Dalam ribu rupiah

NO	KEMENTERIAN/ UNIT ORGANISASI	PAGU KEBUTUHAN TA 2025	NOTA KEUANGAN RAPBN TA 2025	PERGESE- RAN ANTAR UNOR	PENAMBAHAN	PENYESUAIAN NOTA KEUANGAN RAPBN TA 2025
		A	B	C	D	B+C+D
1.	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	136.944.971.043	75.632.263.316	-	40.594.781.997	116.227.045.313
a.	Sekretariat Jenderal	528.443.118	528.443.118	-	-	528.443.118
b.	Inspektorat Jenderal	98.911.139	98.911.139	-	-	98.911.139
c.	Ditjen Bina Marga	54.509.009.983	32.312.579.377	(100.000.000)	5.100.000.000	37.312.579.377
d.	Ditjen Cipta Karya	23.200.245.606	10.482.438.331	(100.000.000)	23.259.473.559	33.641.911.890
e.	Ditjen Sumber Daya Air	45.425.934.841	26.534.770.663	(100.000.000)	11.984.780.000	38.419.550.663
f.	Ditjen Perumahan	12.034.985.813	4.527.680.145	300.000.000	250.528.438	5.078.208.583
g.	Ditjen Bina Konstruksi	558.368.494	558.368.494	-	-	558.368.494
h.	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	92.795.782	92.795.782	-	-	92.795.782
i.	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	347.315.335	347.315.335	-	-	347.315.335
j.	Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan	148.960.932	148.960.932	-	-	148.960.932

- Komisi V DPR RI bersama Kementerian PUPR sepakat untuk melakukan sinkronisasi anggaran menurut fungsi dan program dalam RAPBN TA 2025 sesuai dengan saran, masukan serta usulan Komisi V DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 12.45.WIB.

Jakarta, 18 September 2024

**MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT,**

ttd

M. BASOEKI HADIMOELJONO

KETUA RAPAT,

ttd

L A S A R U S